RENCANA KERJA
KECAMATAN PURWOASRI
TAHUN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

TAHUN 2023

DAFTAR ISI

Daftar Isi i
Kata Pengantar ii

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 2
1.3 Maksud dan Tujuan 6
1.4 Sistematika Penulisan 7

BAB II. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD .. 8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 12
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 14
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 15
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 24

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN KINERJA

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 27
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah..... 27
3.3 Program dan Kegiatan 27

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD 36

BAB V. PENUTUP 40

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat-Nya sehingga dokumen perencanaan yaitu Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 ini dapat tersusun hingga selesai. Tidak lupa kami juga mengucapkan banyak terimakasih atas bantuan dari semua pihak yang telah berkontribusi dengan memberikan dukungan dan pikirannya.

Diharapkan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 ini dapat dijadikan acuan pelaksanaan Program/ Kegiatan bagi Kecamatan Purwoasri guna mendukung Visi dan Misi Bupati Kediri dalam menjalankan roda pemerintahan Kabupaten Kediri ke arah yang lebih baik.

Dengan tertib administrasi di bidang pemerintahan khususnya di kegiatan perencanaan, maka disusunlah Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 ini, sehingga diharapkan dapat dijalankan secara akuntabel, terukur, efektif dan efisien.

Kediri, 02 - 08 - 2023
CAMAT PURWOASRI

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
KECAMATAN PURWOASRI

BUYUNG IMANU, S.Sos.
Pembina
NIP 196909291996021001

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Kecamatan sebagai salah satu SKPD, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, berkewajiban membuat Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2024. Penyusunan Rencana Kerja merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja SKPD untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Kerja Kecamatan Purwoasri adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun yang yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap SKPD. Penyusunan Rencana Kerja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang telah dirumuskan dalam RKPD Kabupaten Kediri Tahun 2024.

Guna mencapai tujuan yang diharapkan, perlu pembuatan Rencana Kerja yang tepat sesuai dengan karakteristik kelembagaan kecamatan yang berbasis pemerintahan kewilayahan. Adapun penguatan fungsi dan kewenangan kecamatan, yaitu:

1. Fungsi Pembinaan Wilayah, yang bertujuan untuk mewujudkan wilayah Kecamatan Purwoasri yang kondusif yang memiliki daya dukung bagi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan di Kabupaten Kediri.
2. Fungsi Pelayanan Publik, yang bertolak dari posisi kecamatan sebagai perangkat daerah yang terdekat posisinya dengan masyarakat dan sejalan dengan strategi mendekatkan institusi pelayan kepada masyarakat.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Purwoasri disusun atas dasar sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 2 Seri D);
29. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 35 Seri E);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 14 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 94);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2014 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 133);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 176);
33. Peraturan Bupati Kediri Nomor 33 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2023 Nomor 33).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Kerja ini dimaksudkan untuk :

1. Memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Purwoasri Tahun 2024;
2. Sebagai pemandu bagi pelaksanaan program / kegiatan Kecamatan Purwoasri pada Tahun 2024;
3. Memberikan arah dan pedoman perencanaan pembangunan tahunan Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan prioritas agar terarah dan terpadu sesuai dengan tugas dan fungsi serta isu permasalahan yang perlu segera ditangani.

Sedangkan tujuan dalam penyusunan Rencana Kerja ini adalah:

1. Mensinkronkan serta mensinergikan program dan kegiatan Kecamatan Purwoasri Tahun 2024 dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RKPD Kabupaten Kediri Tahun 2024;
2. Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan Purwoasri;
3. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya;
4. Tersusunnya kegiatan Kecamatan Purwoasri Tahun Anggaran 2024 yang terurai secara tepat dan terarah pada tingkat kebijakan, program dan kegiatan serta rencana anggaran yang berbasis regulasi, tupoksi dan evaluasi.

Selain itu, tujuan disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Purwoasri adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan skala prioritas permasalahan pembangunan yang harus segera ditangani serta sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing seksi, dan bagian di Kecamatan Purwoasri. Adapun sasaran yang ingin dicapai dengan disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Purwoasri adalah agar program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara tepat, terarah sesuai dengan rencana anggaran yang berbasis regulasi, tupoksi dan hasil evaluasi.

Penyusunan Rencana Kerja ini juga bertujuan untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Kecamatan Purwoasri dalam turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dokumen Rencana Kerja Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri adalah sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD

Bab V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Sebagai bahan acuan untuk pembuatan Rencana Kerja Tahun 2024, Kecamatan Purwoasri menggunakan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2022 dan perkiraan capaian tahun berjalan (2023) yang mengacu pada APBD Tahun 2023. Selanjutnya, evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2022 juga dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Kecamatan Purwoasri berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Kecamatan Purwoasri tahun-tahun sebelumnya (2021 - 2026). Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Purwoasri tahun lalu dan realisasi Renstra, mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Kecamatan Purwoasri dan/atau realisasi APBD Kecamatan Purwoasri sebagaimana tercantum pada tabel 2.1 berikut :

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d tahun 2022
Kabupaten Kediri

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN PURWOASRI

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD Tahun 2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program/ Kegiatan Renja SKPD 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun Berjalan	
										Target Renja SKPD	Realisasi Renja SKPD	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5 + 7 + 9)	11 = (10/4)
7	**01**	**01**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**		
7	01	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 Dok	6 dok	5 Dok	5 dok	100%	5 Dok	16 dok	100,00%
7	01	01	2	02		Administrasi Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan	150 Lap	50 lap	50 lap	`50 Lap	100%	50 Lap	150 lap	100,00%
7	01	01	2	03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah	12 Lap	4 lap	4 lap	4 lap	100%	4 Lap	12 lap	100,00%
7	01	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	162 Keg	54 Keg	54 keg	54 Keg	100%	54 Keg	162 keg	100,00%
7	01	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	12 Keg	2 keg	5 keg	5 keg	100%	5 Keg	12 keg	100,00%

7	01	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72	Keg	24	keg	24	Keg	24	keg	100%	24	Keg	72 keg	100,00%
7	01	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah	48	Keg	16	Keg	16	keg	16	keg	100%	16	Keg	48 keg	100,00%
7	**01**	**02**				**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	***Cakupan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan***	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		**100%**	**100%**			
7	01	02	2	01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	18	Keg	6	keg	6	keg	6	keg	100%	6	Keg	18 keg	100,00%
7	01	02	2	02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	18	Keg	6	Keg	6	keg	6	Keg	100%	6	Keg	18 keg	100,00%
7	01	02	2	03		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	6	Keg	2	keg	2	Keg	2	Keg	100%	2	Keg	6 keg	100,00%
7	**01**	**03**				**Program Pemberdayaan Masayarakat Desa dan Kelurahan**	***Cakupan Koordinasi Pemberdayaan Desa/Kelurahan***	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		**100%**	**100%**			
7	01	03	2	01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	23	Desa	23	desa	23	desa	23	desa	100%	23	Desa	23 desa	100,00%
7	01	03	2	01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan	2	Keg	0	Keg	1	Keg	1	Keg	100%	1	Keg	2 keg	100,00%
7	**01**	**04**				**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	***Cakupan koordinasi ketentraman ketertiban di wilayah kecamatan***	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		**100%**	**100%**			
7	01	04	2	01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	23	Desa	23	desa	23	desa	23	desa	100%	23	Desa	23 desa	100,00%
7	**01**	**05**				**Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum**	***Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Ditangani***	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		**100%**	**100%**			

7	01	05	2	01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	4	Keg	0	Keg	2	Keg	2 keg	100%	2	Keg	4 keg	100,00%
7	**01**	**06**				**Program Penyelenggaraan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	***Persentase Pemerintahan Desa yang Dibina***	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		**100%**			
7	01	06	2	01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemrintahan Desa	23	Desa	23	desa	23	desa	23	desa	100%	23	Desa	23 desa	100,00%

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Analisis kinerja pelayanan Kecamatan Purwoasri dilakukan berdasarkan 2 (dua) indikator utama, yaitu Capaian Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Konflik Berlatar Belakang Agama dan Sosial yang dilaporkan dan terfasilitasi. IKM adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Tujuan dilakukannya survey IKM adalah untuk mengetahui seberapa jauh nilai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan aparatur Pemerintah Kecamatan Purwoasri dalam melayani surat menyurat atau pelayanan masyarakat lainnya. Survey IKM di Kecamatan Purwoasri yang dilaksanakan pada tahun 2021 adalah 79,9% dan 84,9% pada tahun 2022. Berdasarkan Tabel Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan yang terdapat dalam Lampiran Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017, Kecamatan Purwoasri memiliki nilai indek dengan Mutu Pelayanan **B,** yang berarti bahwa Kinerja Unit Pelayanan sudah baik. Kecamatan Purwoasri akan tetap berupaya meningkatkan Kinerja Unit Pelayanan Masyarakat hingga tercapai mutu pelayanan yang lebih baik lagi.

Adapun untuk penanganan konflik berlatar belakang agama dan sosial, sudah dapat dilakukan dengan baik. Situasi kondusif ini dapat terwujud karena adanya kerjasama yang baik antar pihak yang berwenang dan masyarakat.

Hasil Survey IKM dilakukan setiap tahun dan telah dikirim ke Bagian Organisasi Pemerintah Kabupaten Kediri dan untuk laporan penanganan konflik di wilayah telah dikirim ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Analisis kinerja pelayanan Kecamatan Purwoasri selengkapnya disajikan dalam tabel berikut

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Purwoasri
Kabupaten Kediri

No.	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Capaian Nilai IKM Kecamatan Purwoasri	Keputusan Camat Purwoasri No 03 Tahun 2018	Hasil perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Setiap Tahun	82,6%	82,7%	82,8%	82,9%	79,9%	84,9%	86%	87%	untuk tahun Anggaran 2023 realisasi capaian nilai IKM belum ada karena survey belum dilakukan
2	Persentase Pelayanan yang Dilaksanakan Tepat Waktu		Jumlah konflik yang diselesaikan dibanding Jumlah konflik yang dilaporkan dalam 1 tahun x 100%	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%	100%	

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Dalam Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2021 – 2026, Pemerintah Kabupaten Kediri menetapkan Visi: "***Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kediri yang Maju, Berkarakter Nasionalis – Religius, serta Sejahtera Berdasarkan Ekonomi Kerakyatan yang didukung Birokrasi yang Melayani***". Untuk mewujudkan Visi tersebut ditetapkan 9 Misi pembangunan Kabupaten Kediri tahun 2021 – 2026. Berdasarkan realisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan di lingkungan Kabupaten Kediri, Kecamatan Purwoasri mendukung visi dan misi tersebut terutama yang terkait dengan misi ke 2, yaitu "***Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik***".

Sebagai langkah awal untuk mewujudkan visi misi tersebut perlu dilakukan evaluasi kinerja SKPD untuk menemukan isu-isu strategis di wilayah Kecamatan Purwoasri. Isu - isu strategis adalah permasalahan - permasalahan yang mendesak dan perlu segera ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Kediri, khususnya yang ada di wilayah Kecamatan Purwoasri. Sebagai kelembagaan yang berbasis pemerintahan wilayah, isu-isu strategis di Kecamatan Purwoasri terbagi dalam 2 fungsi yaitu :

1. Fungsi Pembinaan Wilayah
   a. Dalam rangka mempertahankan situasi keamanan wilayah yang kondusif terutama menjelang pemilu, Kecamatan harus selalu meningkatkan koordinasi dengan Koramil, Polsek, Pemerintah Desa dan Masyarakat dalam mengantisipasi dan meminimalisir konflik yang ada di wilayah.
   b. Kurangnya motivasi masyarakat untuk meningkatkan inovasi baru dalam pengelolaan sumber daya alam yang ada sebagai produk unggulan daerah.
   c. Masih kurangnya kinerja aparatur pemerintah desa
   d. Masih tingginya angka stunting pada anak.
2. Fungsi Pelayanan Publik
   a. Capaian nilai IKM sudah sesuai target yang ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Purwoasri menunjukkan bahwa layanan kepada masyarakat masih sudah sesuai dengan yang diharapkan
   b. Masih kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia yang tersedia sehingga tingkat ketepatan waktu penyelesaian tugas tidak sesuai dengan target yang diharapkan.

Isu-isu strategis tersebut memerlukan perhatian dan penyelesaian lebih lanjut dari instansi terkait, terutama pemerintah di tingkat Kecamatan Purwoasri agar tidak menghambat terwujudnya Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri. Beberapa kebijakan yang akan diterapkan untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu ditindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan tahun 2024 antara lain sebagai berikut :

1. Mengadakan kegiatan sosialisasi sistem pengendalian keamanan lingkungan kepada masyarakat dan meningkatkan kegiatan patroli gabungan bersama pihak terkait.
2. Meningkatkan kinerja pelayanan administrasi perkantoran, yaitu dengan melengkapi SOP yang seharusnya ada dan mensosialisasikannya kepada masyarakat, sehingga masyarakat pemohon layanan dapat terlayani dengan baik.
3. Meningkatkan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang pelayanan pencetakan e-KTP dan Adminduk lainnya
4. Meningkatkan peran aktif pemilik Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam kegiatan pelatihan pengolahan bahan pangan dan pameran produk unggulan, baik yang diselenggarakan di tingkat Kabupaten, Provinsi maupun Nasional.
5. Mengadakan pembinaan rutin kepada Kepala Desa, Perangkat Desa dan Perangkat Desa lainnya dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dan dalam upaya penurunan stunting di wilayahnya.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Untuk usulan hasil RKPD Tahun 2024 disampaikan pada tahun n-1 (2023) pada triwulan pertama, sedangkan untuk usulan Prioritas Pembangunan di wilayah yang disampaikan adalah hasil dari Musrenbang di tingkat kecamatan dan akan menjadi acuan untuk membuat rencana kerja tahun berikutnya dan akan diteruskan dalam Musrenbang tingkat Kabupaten. Review terhadap rancangan awal RKPD dilakukan dengan membandingkan antara Target Capaian Indikator Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan pada tahun yang sama.

Hasil review terhadap rancangan awal RKPD tidak terdapat perbedaan yang signifikan terhadap usulan program dan kegiatan Kecamatan Purwoasri.

Pada prinsipnya program dan kegiatan tersebut merupakan kelanjutan dari program dan kegiatan tahun sebelumnya. Berdasarkan analisis kebutuhan apabila dibandingkan dengan rancangan awal tidak terdapat perbedaan, dimana program dan kegiatan yang telah dirumuskan merupakan program dan kegiatan telah disusun berdasarkan skala prioritas kecuali pagu indikatif SKPD dan pagu indikatif kewilayahan yang telah ditetapkan. Hasil Review selengkapnya disajikan pada tabel 2.3 berikut :

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kabupaten Kediri

SKPD : Kecamatan Purwoasri

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Cat
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Kec. Purwoasri	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90%	2.873.081.450	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Kec. Purwoasri	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90%	2.873.081.450	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	90%	3.264.100	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	90%	3.264.100	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*2 dok*	*855.200*	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*		*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*2 dok*	*855.200*	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		*Jumlah Dokumen RKA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	*1 dok*	*651.400*	*Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*		*Jumlah Dokumen RKA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	*1 dok*	*651.400*	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	*1 dok*	*1.182.000*	*Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*		*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	*1 dok*	*1.182.000*	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*1 lap*	*575.500*	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*		*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*1 lap*	*575.500*	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan	90%	2.767.670.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan	90%	2.767.670.000	

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	*21 Orang/ Bulan*	*2.717.004.900*	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*		*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	*21 Orang/ Bulan*	*2.717.004.900*	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	*12 dok*	*10.950.400*	*Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*		*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	*12 dok*	*10.950.400*	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD*	*12 dok*	*38.438.800*	*Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*		*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD*	*12 dok*	*38.438.800*	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	*1 lap*	*559.500*	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*		*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	*1 lap*	*559.500*	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD*	*16 lap*	*671.400*	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*		*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD*	*16 lap*	*671.400*	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Adminsitrasi Umum/Barang	90%	3.806.200	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Adminsitrasi Umum/Barang	90%	3.806.200	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*	*12 lap*	3.806.200	*Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*		*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*	*12 lap*	3.806.200	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Umum/ Barang Cetakan	90%	14.762.600	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Umum/ Barang Cetakan	90%	14.762.600	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	*4 paket*	*762.500*	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*		*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	*4 paket*	*762.500*	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	*4 paket*	*866.400*	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*		*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	*4 paket*	*866.400*	

	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Disediakan*	*12 paket*	*3.600.000*	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*		*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Disediakan*	*12 paket*	*3.600.000*	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	*12 dok*	*2.100.000*	*Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan*		*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	*12 dok*	*2.100.000*	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*12 lap*	*6.900.000*	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*		*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*12 lap*	*6.900.000*	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		*Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD*	*12 dok*	*533.700*	*Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD*		*Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD*	*12 dok*	*533.700*	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	90%	25.320.600	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	90%	25.320.600	
	Pengadaan Mebel		*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*	*15 Unit*	*6.320.600*	*Pengadaan Mebel*		*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*	*15 Unit*	*6.320.600*	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		*Jumlah Unig Peralatan dan Mesin yang Disediakan*	*1 Unit*	*19.000.000*	*Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*		*Jumlah Unig Peralatan dan Mesin yang Disediakan*	*1 Unit*	*19.000.000*	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Umum	90%	47.861.580	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Umum	90%	47.861.580	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	*12 lap*	*8.585.580*	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*		*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	*12 lap*	*8.585.580*	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	*12 lap*	*39.276.000*	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*		*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	*12 lap*	*39.276.000*	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Umum/ Pemeliharaan Barang Milik Daerah	90%	10.396.370	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Umum/ Pemeliharaan Barang Milik Daerah	90%	10.396.370	

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya*	*1 unit*	*5.000.000*	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*		*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya*	*1 unit*	*5.000.000*	
	Pemeliharaan Mebel		*Jumlah Mebel Yang Dipelihara*	*2 unit*	*900.000*	*Pemeliharaan Mebel*		*Jumlah Mebel Yang Dipelihara*	*2 unit*	*900.000*	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	*2 unit*	*690.000*	*Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*		*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	*2 unit*	*690.000*	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	*1 unit*	*3.806.370*	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*		*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	*1 unit*	*3.806.370*	
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kec. Purwoasri	Cakupan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	100%	19.393.600	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kec. Purwoasri	Cakupan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	100%	19.393.600	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	8.384.700	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	8.384.700	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		*Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait*	*6 lap*	*8.384.700*	*Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait*		*Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait*	*6 lap*	*8.384.700*	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		*Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*	*5 dok*	*3.633.200*	*Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*		*Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*	*5 dok*	*3.633.200*	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100%	4.053.300	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100%	4.053.300	

	Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Kecamatan		*Jumlah Dokumen Perencanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan*	*2 dok*	*1.740.500*	*Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Kecamatan*		*Jumlah Dokumen Perencanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan*	*2 dok*	*1.740.500*	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	*3 lap*	*2.312.800*	*Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*		*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	*3 lap*	*2.312.800*	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat		Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	100%	6.955.600	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat		Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	100%	6.955.600	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan		*Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan*	*2 lap*	*6.955.600*	*Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan*		*Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan*	*2 lap*	*6.955.600*	
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kec. Purwoasri	Cakupan Koordinasi Pemberdayaan Desa/ Kelurahan	100%	15.826.200	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kec. Purwoasri	Cakupan Koordinasi Pemberdayaan Desa/ Kelurahan	100%	15.826.200	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	10.066.400	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	10.066.400	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa		*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa*	*5 Lembaga Kemasyarakatan*	*7.118.300*	*Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa*		*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa*	*5 Lembaga Kemasyarakatan*	*7.118.300*	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	*3 lap*	*2.948.100*	*Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*		*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	*3 lap*	*2.948.100*	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakat Tingkat Kecamatan	100%	5.759.800	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakat Tingkat Kecamatan	100%	5.759.800	

	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan		*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya*	*1 Lembaga Kemasyarakatan*	*5.759.800*	*Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan*		*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya*	*1 Lembaga Kemasyarakatan*	*5.759.800*	
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Purwoasri	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	100%	1.378.400	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Purwoasri	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	100%	1.378.400	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	1.378.400	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	1.378.400	
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		*Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat*	*2 lap*	1.378.400	*Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat*		*Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat*	*2 lap*	1.378.400	
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kec. Purwoasri	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Ditangani	100%	68.809.600	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kec. Purwoasri	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Ditangani	100%	68.809.600	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	68.809.600	Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	68.809.600	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengalaman Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengalaman Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia*	*50 orang*	*17.516.100*	*Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengalaman Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia*		*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengalaman Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia*	*50 orang*	*17.516.100*	

	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Di Tingkat Kecamatan		*Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Tingkat Kecamatan yang Terlaksana*	*12 dok*	*51.293.500*	*Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Di Tingkat Kecamatan*		*Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Tingkat Kecamatan yang Terlaksana*	*12 dok*	*51.293.500*	
6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Kec. Purwoasri	Persentase Pemerintahan Desa yang Dibina	100%	15.613.350	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Kec. Purwoasri	Persentase Pemerintahan Desa yang Dibina	100%	15.613.350	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa		Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	15.613.350	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa		Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	15.613.350	
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa*	*23 dok*	*1.653.300*	*Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa*		*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa*	*23 dok*	*1.653.300*	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa*	*23 dok*	*4.264.400*	*Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa*		*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa*	*23 dok*	*4.264.400*	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pendayagunaan Aset Desa		*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa*	*23 dok*	*8.114.250*	*Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pendayagunaan Aset Desa*		*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa*	*23 dok*	*8.114.250*	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan		*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan*	*23 dok*	*1.581.400*	*Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan*		*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan*	*23 dok*	*1.581.400*	
	JUMLAH				**2.994.102.600**					**2.994.102.600**	

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam menjalankan fungsi pembinaan wilayah, Kecamatan Purwoasri memiliki peran penting untuk mengakomodasi usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan di Kecamatan, LSM, asosiasi-asosiasi dari SKPD Kabupaten Kediri.

Untuk setiap usulan dan kegiatan masyarakat selalu ditampung dan dilihat mana yang lebih penting melalui kegiatan Musrenbang di tingkat desa dan kecamatan, untuk diteruskan dalam Musrenbang tingkat Kabupaten. Pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan Purwoasri yang diikuti oleh perwakilan dari pemerintah di tingkat desa dan kecamatan, LSM dan kelompok masyarakat telah menghasilkan usulan prioritas program dan kegiatan masyarakat, seperti yang disajikan dalam tabel 2.4 berikut :

Daftar Usulan Kegiatan Prioritas Hasil Musrenbangcam
Kecamatan Purwoasri
Tahun 2024

No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Masalah	Besaran/ Volume
1	2	3	4	5
	BIDANG PRASARANA WILAYAH			
1.	Bantuan Keuangan Desa	Dsn. Ploso Ds. Jantok	Pembangunan TPT jalan	Rp. 200.000.000
2.	Bantuan Keuangan Desa	Dsn. Wonorenggo Ds. Pesing	Pengerasan jalan Wonorenggo-Tanon	2,5 m x 600 m (Rp. 200.000.000)
3.	Bantuan Keuangan Desa	Ds. Mranggen (SPBU ke arah timur)	Aspal jalan / Hotmix jalan usaha tani	400 m (Rp. 200.000.000)
4.	Bantuan Keuangan Desa	Dsn. Mlilir Ds. Purwoasri	Rehabilitasi jembatan	1 unit (Rp. 200.000.000)
5.	Bantuan Keuangan Desa	Ds. Wonotengah	Pembangunan saluran drainase	345 m (Rp. 200.000.000)
6.	Bantuan Keuangan Desa	Dsn. Pujomarto Ds, Ketawang	Hotmix lanjutan	1.400 m (Rp. 200.000.000)
7.	Bantuan Keuangan Desa	Dsn. Juwono Ds. Belor	Pengaspalan jalan Dsn. Juwono	1 lokasi (Rp. 200.000.000)
8.	Bantuan Keuangan Desa	Sawah Ngusen s/d Sawah Weden Dsn. Blawe Kulon Ds. Blawe	Pengerasan jalan / Rabat beton	500 m (Rp. 200.000.000)
9.	Bantuan Keuangan Desa	Dsn. Pandansari, Jetis, Kedungdowo dan Sugihwaras Ds. Pandansari	Peningkatan jalan hotmix	3km (Rp. 200.000.000)
10.	Bantuan Keuangan Desa	Dsn. Morodeso Ds. Purwodadi	TPT Kidul Omah RT 01 RW 08	440 m x 80 cm (Rp. 140.485.000)
11.	Bantuan Keuangan Desa	Dsn. Turus Ds. Bulu	Plengsengan (Drainase) saluran air Utara Sungai Wangan Sebelah Barat	450 m (Rp. 200.000.000)
12.	Bantuan Keuangan Desa	Ds. Tugu	Pembangunan penerangan jalan umum	30 lokasi (Rp. 200.000.000)
13.	Bantuan Keuangan Desa	Dsn. Sidomulyo Ds. Sidomulyo, Kab. Kediri	Pemeliharaan / penyemiran jalan aspal	1.600 m x 3 m (Rp. 125.000.000)
14.	Bantuan Keuangan Desa	Jln. Sawah Bogo Lor Ds. Klampitan	Pembangunan jalan aspal sawah tengah Bogo Lor Dsn. Bogo Lor	750 m (Rp. 200.000.000)
15.	Bantuan Keuangan Desa	Dsn. Woromarto Ds. Woromarto	Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT)	300 m (Rp. 100.000.000)
16.	Bantuan Keuangan Desa	Dsn. Nglungge Ds. Muneng	Rehabilitasi jalan / jalan aspal	385 m (Rp. 200.000.000)
17.	Bantuan Keuangan Desa	Dsn. Maduh dan Dsn. Merjoyo Ds. Merjoyo	Lampu penerangan jalan	75 tiang (Rp. 200.000.000)

18.	Bantuan Keuangan Desa	Jl. Delima Dsn. Banjardowo Ds. Mekikis	Hotmix	2,5 x 1150 m (Rp. 200.000.000)
19.	Bantuan Keuangan Desa	Dsn. Karangpakis Ds. Karangpakis	Pembangunan TPT	416 m x 0,80 m, (Rp. 150.000.000)
			Pengerasan jalan / urug	416 m (Rp. 50.000.000)
20.	Bantuan Keuangan Desa	Dsn. Dayu RT 002 RW 003 Ds. Dayu	Pengerasan jalan usaha tani selatan Desa Dayu	2000 m (Rp. 200.000.000)
21.	Bantuan Keuangan Desa	Desa Dawuhan	Pembangunan jalan tembus Ds. Dawuhan sampai Dsn. Ngelo	620 m (Rp. 200.000.000)
22.	Bantuan Keuangan Desa	Desa Kempleng	Jalan aspal PU Woromarto sampai Sumberjo	3000 m (Rp. 200.000.000)
23.	Bantuan Keuangan Desa	Dsn. Gogor Ds. Sumberjo	Perbaikan jalan Dsn. Gogor	1 paket (Rp. 200.000.000)

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan tahunan setiap unit kerja daerah dan disusun sebagai penurunan Renstra dan memuat rencana kegiatan pembangunan tahunan berikutnya, yang dilengkapi dengan formulir kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta indikasi pembiayaan satu tahun kedepan.

Rencana Kerja disusun berdasarkan arah kebijakan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026 yang penyusunannya telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Pembangunan Daerah. Penyusunan RPJMD ini juga mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan RPJMD Nasional, RPJPD Dan RPJMD Provinsi serta sebagai kebijakan dan prioritas program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, dengan demikian yang menjadi dasar dari arah kebijakan tugas pokok dan fungsi SKPD selalu terarah pada kebijakan Nasional.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

A. TUJUAN

Sebagaimana visi dan misi yang sudah ditetapkan, Kecamatan Purwoasri mempunyai tujuan strategis, yaitu ***"Terwujudnya Kelembagaan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien dalam Pelayanan".***

B. SASARAN

Sasaran pencapaian keberhasilan yang ingin dicapai oleh Kecamatan Purwoasri adalah "***Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan.***"

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Berdasarakan isu-isu strategis dan arah yang telah dirumuskan, Kecamatan Purwoasri menetapkan program dan kegiatan tahun 2024 sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA

1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   a. *Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*
   b. *Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*
   c. *Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*
   d. *Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*
2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   a. *Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*
   b. *Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*
   c. *Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*
   d. *Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*
   e. *Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD*
3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
   a. *Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*
4) Administrasi Umum Perangkat Daerah
   a. *Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*
   b. *Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*
   c. *Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*
   d. *Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan*
   e. *Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*
   f. *Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD*
5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   a. *Pengadaan Mebel*
   b. *Pngadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*
6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   a. *Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*
   b. *Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*
7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   a. *Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*
   b. *Pemeliharaan Mebel*
   c. *Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*
   d. *Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
   1) Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
      a. *Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait*
      b. *Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*
   2) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
      a. *Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Kecamatan*
      b. *Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*
   3) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat
      a. *Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan*

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
   1) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
      a. *Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa*
      b. *Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*
   2) Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
      a. *Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan*

4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
   1) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
      a. *Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat*

5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
   1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
      a. *Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengalaman Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia*
      b. *Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Di Tingkat Kecamatan*

6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA
   1) Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa
      a. *Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa*
      b. *Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa*
      c. *Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pendayagunaan Aset Desa*
      d. *Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan*

Dari program dan kegiatan tersebut, pada tahun 2024 sebagian besar lokasi kegiatan berada di wilayah Kecamatan Purwoasri dengan alokasi pagu indikatif semua bersumber dari APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri sebesar Rp. 3.126.968.570.

Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024 selengkapnya disajikan dalam format table 2.5 berikut :

Tabel : 2.5
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Kediri

SKPD : Kecamatan Purwoasri

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Kegiatan	Indikator Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		90	%	**2.873.081.450**			**2.890.866.570**	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		90	%	**3.264.100**			**5.231.300**	
7.01.01.2.01.01	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*Purwoasri*	*2*	*dok*	***855.200***	*DAU*		***1.468.300***	*DAU*
7.01.01.2.01.02	*Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	*Purwoasri*	*1*	*dok*	***651.400***	*DAU*		***659.500***	*DAU*
7.01.01.2.01.03	*Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	*Purwoasri*	*1*	*dok*	***1.182.000***	*DAU*		***1.609.200***	*DAU*
7.01.01.2.01.06	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*Purwoasri*	*1*	*lap*	***575.500***	*DAU*		***1.494.300***	*DAU*
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan		90	%	**2.767.670.000**			**2.693.661.870**	
7.01.01.2.02.01	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	Purwoasri	*21*	*Org/ bln*	**2.717.004.900**	DAU		**2.620.816.170**	DAU
7.01.01.2.02.02	*Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	*Purwoasri*	*12*	*Dok*	***10.950.400***	*DAU*		***30.324.600***	*DAU*

7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Purwoasri	12	Dok	38.438.800	DAU		39.690.000	DAU
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Purwoasri	1	Lap	559.500	DAU		790.500	DAU
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	Purwoasri	16	Lap	671.400	DAU		2.040.600	DAU
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Umum / Barang		90	%	3.806.200			13.785.400	
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Purwoasri	12	lap	3.806.200	DAU		13.785.400	DAU
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum / Barang Cetakan		90	%	14.762.600			22.373.000	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Purwoasri	2	Pkt	762500	DAU		1.856.000	DAU
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Purwoasri	4	Pkt	866.400	DAU		2.350.800	DAU
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Disediakan	Purwoasri	12	Pkt	3.600.000	DAU		3.360.000	DAU
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Purwoasri	12	dok	2.100.000	DAU		2.520.000	DAU
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Purwoasri	12	Lap	6.900.000	DAU		7.500.000	DAU
7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Purwoasri	12	Dok	533.700	DAU		4.786.200	DAU
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah		90	%	25.320.600			39.111.000	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Purwoasri	15	Unit	6.320.600	DAU		20.111.000	DAU
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unig Peralatan dan Mesin yang Disediakan	Purwoasri	1	Unit	19.000.000	DAU		19.000.000	DAU
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Umum		90	%	47.861.580			43.454.000	

7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Purwoasri	12	lap	8.585.580	DAU		8.829.000	DAU
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Purwoasri	12	lap	39.276.000	DAU		34.625.000	DAU
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Umum / Pemeliharaan Barang Milik Daerah		90	%	10.396.370			73.250.000	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Purwoasri	1	unit	5.000.000	DAU		5.000.000	DAU
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel Yang Dipelihara	Purwoasri	2	unit	900.000	DAU		5.000.000	DAU
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perafatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Purwoasri	2	unit	690.000	DAU		10.250.000	DAU
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Purwoasri	1	unit	3.806.370	DAU		50.000.000	DAU
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Cakupan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Tingkat Kecamatan		100	%	19.393.600			44.558.700	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100	%	8.384.700			9.529.000	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Purwoasri	6	Lap	4.751.500	DAU		3.907.600	DAU
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Purwoasri	5	Dok	3.633.200	DAU		5.621.400	DAU
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		100	%	4.053.300			9.079.700	
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	Purwoasri	2	dok	1.740.500	DAU		3.420.800	DAU

7.01.02.2.02.03	*Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	*Purwoasri*	*3*	*Lap*	***2.312.800***	*DAU*		***5.658.900***	*DAU*
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat		*100*	*%*	**6.955.600**			**25.950.000**	
7.01.02.2.04.03	*Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan*	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan*	*Purwoasri*	*2*	*Lap*	**6.955.600**	*DAU*		***25.950.000***	*DAU*
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan Koordinasi Pemberdayaan Desa/ Kelurahan		*100*	*%*	**15.826.200**			**80.468.200**	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		*100*	*%*	**10.066.400**			**18.457.900**	
7.01.03.2.01.01	*Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa*	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa*	*Purwoasri*	*5*	*Lembaga Kemasyarakatan*	***7.118.300***	*DAU*		***8.709.200***	*DAU*
7.01.03.2.01.03	*Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	*Purwoasri*	*3*	*Lap*	***2.948.100***	*DAU*		***9.748.700***	*DAU*
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakat Tingkat Kecamatan		*100*	*%*	**5.759.800**			**62.010.300**	
7.01.03.2.03.02	*Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan*	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya*	*Purwoasri*	*1*	*Lembaga Kemasyarakatan*	**5.759.800**	*DAU*		**62.010.300**	*DAU*
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan		*100*	*%*	**1.378.400**			**5.445.200**	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		*100*	*%*	**1.378.400**			**5.445.200**	
7.01.04.2.01.02	*Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat*	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat*	*Purwoasri*	*2*	*Lap*	***1.378.400***	*DAU*		***5.445.200***	*DAU*

7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Ditangani		100	%	**68.809.600**			**78.294.900**	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		100	%	**68.809.600**			**78.294.900**	
7.01.05.2.01.01	*Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengalaman Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia*	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengalaman Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia*	*Purwoasri*	*50*	*Orang*	***17.516.100***	*DAU*		***17.863.100***	*DAU*
7.01.05.2.01.08	*Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Di Tingkat Kecamatan*	*Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Tingkat Kecamatan yang Terlaksana*	*Purwoasri*	*12*	*Dok*	***51.293.500***	*DAU*		***60.431.800***	*DAU*
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pemerintahan Desa yang Dibina		*100*	%	**15.613.350**			**24.735.000**	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		*100*	%	**15.613.350**			**24.735.000**	
7.01.06.2.01.01	*Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa*	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa*	*Purwoasri*	*23*	*Dok*	***1.653.300***	*DAU*		***5.678.400***	*DAU*
7.01.06.2.01.02	*Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa*	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa*	*Purwoasri*	*23*	*Dok*	***4.264.400***	*DAU*		***7.604.400***	*DAU*
7.01.06.2.01.03	*Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pendayagunaan Aset Desa*	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa*	*Purwoasri*	*23*	*Dok*	***8.114.250***	*DAU*		***7.621.200***	*DAU*
7.01.06.2.01.12	*Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan*	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan*	*Purwoasri*	*23*	*Dok*	***1.581.400***	*DAU*		***3.831.000***	*DAU*
JUMLAH						***2.994.102.600***			***3.124.368.570***	

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berikut adalah Rencana Kerja dan Pendanaan SKPD Kecamatan Purwoasri Tahun 2024:

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	BELANJA LANGSUNG (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	**2.873.081.450**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.264.100
	Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*853.200*
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	*651.400*
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	*1.182.000*
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*573.500*
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumenn Pelaksanaan Administrasi Keuangan*	2.767.670.000
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	*2.717.004.900*
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	*10.950.400*
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD*	*38.438.800*
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	*559.500*
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	*Jumlah laporan keuanganan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD*	*671.400*
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Umum/ Barang	3.806.200
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*	*3.806.200*
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum/ Barang Cetakan	14.762.600
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	*762.500*

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	*866.400*
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	*3.600.000*
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan*	*2.100.000*
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*6.900.000*
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD*	*533.700*
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	25.320.600
	Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*	*6.320.600*
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	*19.000.000*
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Umum	47.861.580
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan ListrikPenyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	*8.585.580*
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	*39.276.000*
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Umum/ Pemeliharaan Barang Milik Daerah	10.396.370
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya*	*5.000.000*
	Pemeliharaan Mebel	*Jumlah Mebel yang Dipelihara*	*900.000*
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	*690.000*
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi*	*3.806.370*
2	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Cakupan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tingkat Kecamatan**	**19.393.600**
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	8.384.700
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	*Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait*	*4.751.500*
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*	*3.633.200*
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	4.053.300
	Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Kecamatan	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan*	*1.740.500*

	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	*2.312.800*
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	6.955.600
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan*	*6.955.600*
3	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Cakupan koordinasi pemberdayaan Desa/ Kelurahan**	**15.826.200**
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	10.066.400
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa	*Jumlah Lembaga Kemaasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa*	*7.118.300*
	Peningkatan efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	*2.948.100*
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	5.759.800
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya*	*5.759.800*
4	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan**	**1.378.400**
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.378.400
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	*Jumlah Laporan Pelaksanaa Harmonisasi Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat*	*1.378.400*
5	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang ditangani**	**68.809.600**
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	68.809.600
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengalaman Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia*	*17.516.100*
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	*Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan*	*51.293.500*
6	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase pemerintahan Desa yang dibina**	**15.613.350**
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	15.613.350
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa*	*1.653.300*

	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa*	*4.264.400*
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pendayagunaan Aset Desa	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa*	*8.114.250*
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga kemasyarakatan*	*1.581.400*
	JUMLAH		**2.994.102.600**

BAB V
PENUTUP

Di dalam laporan Rencana Kerja Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri telah diuraikan hasil pembangunan Urusan Pemerintahan (Unsur Penunjang) bidang pemerintahan (Fungsi Penunjang Lainnya) Rencana Kerja Tahun 2024 dan perkiraan capaian tahun berjalan 2023.

Rencana Kerja Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri Tahun 2024 ini merupakan rencana kerja tahunan dalam menunjang tercapainya visi dan misi Bupati Kediri serta target dan sasaran pembangunan yang dioparasionalkan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kediri Tahun 2024. Rencana Kerja ini dimaksudkan sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2024 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya.

Dengan adanya Renja ini, diharapkan penyelenggaraan program / kegiatan Kecamatan Purwoasri dapat dilaksanakan secara akuntabel, terukur, efektif dan efisien.

Kediri, 02 - 08 - 2023

CAMAT PURWOASRI

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
KECAMATAN PURWOASRI

BUYUNG IMANU, S.Sos.
Pembina
NIP 196909291996021001

BUPATI KEDIRI,

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA